LATAR BELAKANG

Sesuai arahan GBHN pembangunan disektor perhubungan diarahkan untuk mempelancar arus manusia,barang jasa,dan informasi .dengan demikian diharapkan dapat didorong pemerataan pembangunan keseluruh wilayah,dapat dipercepat laju pertumbuhan ekonomi dan dapat dibantu usaha – usaha menjaga kestabilan nasional .

Tantangan dan permasalahan dalam pelayanan sektor perhubungan secara nasional umumnya,masih dihadapkan pada peningkatan kelancaran dan keselamatan mobilitas angkutan darat ,laut dan udara,serta keaksebilitas pelayanan jasa transportasi diwilayah terpencil dan perbatasan yang belum seluruhnya dapat dijangkau secara memadai.terbatasnya pendanaan pemerintahan daerah untuk pengadaan fasilitas baru,serta pemeliharaan dan rehabilitas prasarana dan sarana transpotrasi yang telah ada,tingkat ketersediaan armada angkutan yang masih sangat terbatas dalam mengakomodasi pergerakan barang dan penumpang khususnya pada wilayah – wilayah terpencil,disisi lain terdapat beberapa kondisi sarana dan prasarana transportasi yang kurang mendapatkan perawatan,terutama prasarana transportasi yang kurang mendapat perhatian pemerintah maupun swasta .

Terbatasnya pendanaan pembangunan sektor perhubungan menuntut perubahan pola pikir kearah perencanaan dan penetapan prioritas pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana sarana perhubungan secara efektif,sesuai permintaan yang berdasarkan pada realisasi.

Lambang Kementerian Perhubungan adalah gambar atau tanda sebagai pengikat batin dan kesatuan jiwa seluruh aparatur serta merupakan pengejawantahan keluhuran misi KEMENHUB dalam keikutsertaan mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.Lambang terdiri dari bentuk lingkaran dan pita bertuliskan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang menggambarkan satu kesatuan, kekompakan dan keterpaduan dalam melaksanakan tugas yang diemban Kementerian Perhubungan untuk mencapai cita-cita Bangsa dan Negara

➤ **Unsur lambang tersebut terdiri dari :**

- Sayap tujuh helai disebelah kiri dan tujuh helai di sebelah kanan

Jangkar yang menyatu dengan sayap dan

- ekor Bola dunia warna biru dengan garis-garis warna emas yang menyatu dengan roda gigi sebanyak 12 buah warna emas dan 12 buah warna biru Ekor warna emas lima helai
- Padi 45 butir dan kapas 17 buah seluruhnya berwarna emas yang tangkainya diikat dengan pita warna emas berbentuk angka delapan
- Seloka "Wahana Manghayu Warga Pertiwi" diletakkan di dalam jangkar warna biru
- Pita warna emas dan biru diletakkan dibawah lingkaran warna mas dengan tulisan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

➤ **Arti unsur-unsur pada lambang ialah :**

- Burung merupakan simbolis sarana tercepat untuk mencapai sasaran dan jangkauan perhubungan juga melambangkan Perhubungan Udara
- Jangkar merupakan sarana kokoh dan kuat menggambarkan misi perhubungan dapat menjangkau Kepulauan Nusantara maupun seluruh dunia dengan tabah dan tenang sekaligus melambangkan Perhubungan Laut
- Bola dunia menggambarkan tugas dan fungsi Perhubungan melayani jasa Perhubungan ke seluruh penjuru dunia
- Padi dan kapas berarti sandang dan pangan yang merupakan cita-cita Bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur
- Roda bergigi 24 terdiri dari 12 warna emas dan 12 warna biru perlambang aparatur perhubungan menjalankan tugas selama 24 jam terus menerus sekaligus melambangkan Perhubungan Darat
- Lingkaran luar warna emas perlambang keseluruhan aparatur Kementerian berfungsi dalam kesatuan sistem Perhubungan Nasional
- Pita pengikat padi dan kapas melambangkan keadilan dan kemakmuran dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain

➤ **Makna unsur-unsur pada lambang ialah :**

- tujuh helai sayap kiri dan kanan bermaknakan Sapta Prasetya KORPRI
- 24 jam gigi roda bermaknakan aparatur perhubungan menjalankan tugasnya selama 24 jam terus menerus melayani masyarakat

➤ **Lima helai ekor bernamakan 5 Citra manusia Perhubungan yaitu :**

- Citra untuk mampu memelihara ketertiban dan kebersihan di segala bidang
- Mampu membudayakan tepat waktu dalam pemberian jasa Perhubungan

- Mampu memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat pengguna jasa Perhubungan
- Mampu bertindak gesit tidak berlaku lamban
- Peka terhadap keluhan masyarakat namun tetap memancarkan kepribadian yang ramah
- 45 butir padi 17 buah kapas yang diikat oleh simpul pita berbentuk angka bermakna tanggal, bulan dan tahun proklamasi RI yaitu 17-8-1945.
- Warna lambang terdiri dari warna biru tua yang melambangkan suasana kedamaian yang terwujud dengan pelayanan jasa angkutan yang dilayani dengan tertib, teratur, cepat, tepat, aman dan nyaman dan warna kuning emas melambangkan kejayaan dan keagungan alam semesta.

LOGO PERHUBUNGAN

- Logo Kementerian Perhubungan adalah suatu bentuk simbolis yang menggambarkan keluarga besar Perhubungan
- Logo terdiri dari bentuk lingkaran mempunyai unsur-unsur roda bergigi, jangkar, burung Garuda, dan bulatan bumi.

Arti dari unsur Logo ialah :

- Roda bergigi berarti matra Perhubungan Darat
- Jangkar berarti matra Perhubungan Laut
- Burung Garuda berarti matra Perhubungan Udara
- Bulatan bumi berarti lingkup pelayanan jasa Perhubungan
- Warna logo terdiri dari warna biru langit (cerulean blue) berarti kedamaian dan kuning berarti keagungan

TUPOKSI :

1 . Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas:

1. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
2. melaksanakan program dan kegiatan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
4. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

5. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
6. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
7. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
8. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
10. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas:

1. menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas;
2. menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
4. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
5. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
6. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
7. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
8. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

3. Kasubag. Adm. Umum & Kepegawaian

Kasubag Adm. Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja dinas;

2. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
3. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
4. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
5. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4. Kasubag. Penyusunan Program

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas:

1. menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan program sesuai dengan rencana kerja dinas;
2. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
3. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dinas;
4. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
5. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
6. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas:

1. menyusun rencana Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan sesuai dengan rencana kerja dinas;
2. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
3. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas;
4. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
5. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas;
6. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
7. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
8. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
9. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5. Kabid. Perhubungan Darat

Kepala Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas:

1. menyusun rencana Bidang Perhubungan Darat sesuai dengan rencana kerja dinas;
2. menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas darat;
3. menyusun rencana dan program pelayanan dan program prasarana lalu lintas dan angkutan darat;
4. memberikan bimbingan keselamatan lalu lintas dan penertiban angkutan darat;
5. melaksanakan analisis terhadap daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan penertiban angkutan Darat;
6. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
7. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan pengembangan karier pegawai;
8. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
9. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

6. Kasi Lalu Lintas dan Angkutan

Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas:

1. menyusun rencana Seksi Lalu Lintas dan Angkutan sesuai dengan rencana kerja dinas;
2. menyelenggarakan manajemen rekayasa lalu lintas dan pengawasan terminal;
3. melaksanakan analisis terhadap daerah rawan kecelakaan lalu lintas darat;
4. melakukan koordinasi dan perbaikan fasilitas pendukung terminal dan pengujian kendaraan bermotor;
5. memproses pertimbangan teknis izin trayek dan menyiapkan bahan kajian penentuan tarif angkutan umum;
6. melakukan penertiban perizinan angkutan barang dan penumpang umum;
7. meningkatkan pengawasan, ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu lintas jalan, di tempat pemberangkatan, pemberhentian angkutan penumpang dan barang;
8. melaksanakan pengendalian, pengawasan, penertiban dan pengelolaan keterminalan, pengujian kendaraan bermotor dan pembinaan perparkiran;
9. melakukan pembinaan penyelenggaraan angkutan umum dan evaluasi kinerja angkutan umum baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek;
menetapkan wilayah operasi untuk jenis angkutan umum yang tidak dalam trayek;
menetapkan serta memberikan usulan lokasi terminal umum dan barang sesuai dengan kebutuhan;
10. menyiapkan bahan dan survey lapangan guna memenuhi data kebutuhan dan pelayanan angkutan penumpang umum dan barang;
11. memberikan rekomendasi dan pembinaan bengkel umum dan sekolah / kursus

- mengemudi;
12. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 13. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan pengembangan karier;
 14. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 15. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

7 Kasi Sarana dan Prasarana

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:

1. menyusun rencana Seksi Sarana dan Prasarana sesuai dengan rencana kerja Dinas;
2. menyusun rencana kebutuhan rambu-rambu lalu-lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
3. merencanakan kebutuhan perlengkapan guna kelancaran operasional di lapangan;
4. melakukan pemasangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas guna kelancaran angkutan darat;
5. melakukan pengendalian, pengawasan terhadap sarana dan prasarana dan fasilitas pendukung lalu lintas jalan, terminal dan pengujian kendaraan bermotor;
6. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
7. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan pengembangan karier;
8. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
9. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.

Menyanyikan lagu Hymne dan Mars Perhubungan

Hymne dan Mars Perhubungan

Admin Portal - Kamis, 13 November 2014

Jumlah Dilihat: 32041 kali

Taqwa Kepadamu Ohh Tuhan Yang Maha Esa
Sejak Manusia Terpencar di Pulau, Gunung, dan Lembah
Rindu Jasa Perhubungan di Darat, Laut, Maupun Udara
Abdi Negara, Pancasila, Melayani dengan 5 (Lima) Citra

Pemasangan Spanduk Selamat Datang oleh Panitia Rakornis

Diskusi intern Perhubungan Sekalimantan Barat

Peserta Diskusi Perhubungan sekalimantan barat

Pemberian Cenderamata Kepada Kepala Biro Perencanaan, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut Oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Foto Bersama Kepala Dinas Provinsi, Kapolsek Beserta Kepala Biro Perencanaan, Dirjen Perhubungan Darat Dirjen Perhubungan Laut

Peserta Rakornis Sekalimantan Barat

Tim Komsumsi Dishub Citytour Danau Sentarum

Persiapan Makan Siang di Batu Ancau Peserta CityTour

**KEGIATAN RAKORNIS 16 APRIL 2018
DI KABUPATEN KAPUAS HULU**

Salam sejahtera untuk kita semua ,

Para peserta Rakornis yang saya Hormati

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpah rahma dan karunianya, sehingga kita dapat melaksanakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Dinas Perhubungan S-Kalimantan Barat Tahun 2018, dengan mengangkat tema " MELALUI RAKORNIS 2018 KITA TINGKATKAN SINKRONISASI PROGRAM DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM YANG HANDAL DALAM PELAYANAN TRANSPORTAS".

Pembukaan Rakornis dibuka oleh Kepala Dinas perhubungan Provinsi Kalimantan Barat

Rapat Koordinasi dan sinkronisasi Bidang Perhubungan ini merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, dalam rangka

- a. Menyamakan Visi dan Misi dan persepsi guna mengimplementasikan berbagai peraturan dan kebijakan dalam bidang pelayanan transportasi dan pengembangan SDM Perhubungan yang selalu mengalami perkembangan sesuai kondisi kekinian
- b. Untuk membangun dan mempererat tali silaturahmi dan komunikasi antara pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan pelayanan sektor transportasi yang handal serta meningkatkan kapasitas SDM Perhubungan, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Harapan kami, dengan diselenggarakannya Rapat koordinasi ini, jalinan silaturahmi dan komunikasi antara pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat terjalin dengan baik, sehingga dengan sangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, segala hambatan dan tantangan dalam pembangunan sub sektor perhubungan dapat kita atasi dengan baik.

Akhirnya, saya ucapkan selamat mengikuti agenda Rapat, semoga apa yang dihasilkan dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi kali ini dapat menambah ilmu, wawasan dan khasanah pikir kita dalam berkarya guna mewujudkan kehandalan pelayanan sektor perhubungan di Kalimantan Barat.

Selamat Bekerja

1. LATAR BELAKANG

Permasalahan di bidang transportasi semakin hari semakin kompleks dan dihadapkan pada tantangan strategis yang perlu disikapi untuk menewahi harapan masyarakat terhadap kinerja di bidang perhubungan yang lebih baik

Untuk mencapai hal tersebut, perlu dilakukan upaya perbaikan, penyempurnaan dan peningkatan kinerja dari setiap unit kerja di bidang perhubungan terkait dengan tata kelola pembangunan, baik ditingkatkan pusat maupun daerah. Upaya dimaksud tidak saja terkait pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus disertai dengan pelaksanaan kebijakan secara konsisten serta komitmen yang kuat dari setiap pemangku tanggung jawab di bidang perhubungan.

Dengan upaya tersebut, diharapkan instansi di bidang perhubungan baik di pusat maupun daerah dapat menjawab dinamika persoalan sekaligus tantangan yang ada saat ini di masyarakat secara nyata dengan disertai berbagai langkah solusi strategis yang langsung dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Melalui Rakornis perhubungan se-kalimantan Barat ini diharapkan dapat dirumuskan berbagai langkah kebijakan dan rencana aksi secara terkoordinasi dan terintegrasi di tingkat pusat maupun tingkat daerah yang selanjutnya dapat dilaksanakan dengan konsisten dilandasi atas kebersamaan dan komitmen yang kuat.

Oleh karena itu, rapat koordinasi dan sinkronisasi ini, disamping membahas permasalahan serta kendala yang masih terjadi dalam penyelenggaraan transportasi dan pemecahan permasalahannya, juga diharapkan dapat diperoleh masukan-masukan dalam hal upaya pengembangan kapasitas SDM yang menjadi penggerak serta sangat menentukan kualitas pelayanan sektor perhubungan.

II. DASAR PELAKSANAAN RAKORNIS

Dasar Pelaksanaan rakornis adalah :

- 1 . Rncana stategis (RENSTRA) Dinas Pehubungan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 2018
2. Kesepakatan Rakornis Tahun 2017 di Kabupaen kayong utara yang menetapkan kabupaten kapuas hulu sebagai tempat penyelenggaraan Rakornis Tahun 2018
3. DPA Dinas perhubungan Provinsi kalimantan barat Tahun 2018 Nomor : 903/073/DPA-SKPD/BPKD-B-TA.2018 Tanggal 3 Januari 2018
4. Keputusan Kepala Dinas perhubungan Provinsi kalimantan Barat tentang Pembentukan panitia penyelenggara Rakornis Tahun 2018

III . MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diselenggarakan Rakornis ahun 2018 adalah :

1. Untuk meningkatkan kapasias sumber daa manusia guna mennjang kinerja penyelenggaraan trasporasi bak di pusat maupun didaerah
2. Perkuatan Insts yang menangani sektor perhubungan baik provinsi maupun di kabupaten /Kota
3. Untuk terus terpeliharanya koordinasi dan sinergitas dalam penyelenggraan pembangunan disemua tingkatan
4. Sebagai ajang silahtrahmi selurh stakehoder perhubungan

Adapun Tujuan yang hendak di capai adalah :

1. Adanya persamaan persepsi dalam mengimplemasi kan berbagai peratran dan kebijakan dibidang ransportasi
2. Menghimpun masukan dari peserta Rakornis terkait pemantapan Rwnja Kerja Dinas Perhubungan ahun 2017
3. Menghimpun Masuka dari peserta Rakornis terhadap permasalahan yang dihadapi dilapanagan dalam Rangka meberikan pelayanan sektor perhubungan

IV. TEMA

Tema Rakornis Tahun 2018 adalah :

**MELALUI RAKORNIS 2018 KITA TINGKATKAN SINKRONISASI PROGRAM
DAN PENGEMBANAGAN KAPASITAS SDM YANG HANDAL DALAM
PELAYANAN TRANSPORTASI**

V. WAKTU DAN TEMPAT

Rakornis dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 18 April 2018 bertempat di **Aula Kantor Bupati Kapuas Hulu** Jalan Antasari No 2 Putussibau Kota

VI . NARASUMBER

Narasumer yang akan memberikan materi pada Rakornis yaitu :

1. Dirjen Perhubungan Darat Kementian Perhubungan RI
2. Dirjen Perhubungan Laut Kementian Perhubungan RI
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Perhubungan RI
4. Kepala Sekolah Tinggi ransportasi Darat Bekasi
5. Kepala Balai Pendididkan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah
6. Kepala Dinas Perhubungan Prov.Kalbar

VII . PESERTA

Peserta Rakornis Terdiri Dari :

1	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	: 25 Orang
2	Dinas Perhubungan Kota Pontianak	: 4 Orang
3	Dinas Perhubungan Kab.kubu Raya	: 4 Orang
4	Dinas Perhubungan Kab.Mempawah	: 4 Orang
5	Dinas Perhubungan Kab Singkawag	: 4 Orang
6	Dinas Perhubungan Kab Sambas	: 4 Orang
7	Dinas perhubungan Kab Bengkayang	; 4 Orang
8	Dinas Perhubungan Kab Landak	: 4 Orang
9	Dinas Perhubungan Kab.Sanggau	: 4 Orang
10	Dinas Perhubungan Kab Sekadau	: 4 Orang
11	Dinas Perhubungan Kab Sekadau	: 4 Orang
12	Dinas perhubungan Kab.Melawi	: 4 Orang
-

13	Dinas Perhubungan Kab Sintang	: 4 Orang
14	Dinas Perhubungan Kab Kayong Uara	: 4 Orang
15	Dinas perhubungan Kab Ketapang :	: 4 Orang
16	Dinas pekerjaan umum Prov Kalbar	: 1 Orang
17	BAPPEDA Prov kalbar	: 1 Orang
18	KSOP Pontianaka	: 1 Orang
19	KSOP Ketapang	: 1 Orang
20	KSOP Sintete	: 1 Orang
21	KSOP Telok Air	: 1 Orang
22	UPP.Telok Menaon	: 1 Orang
23	UPP Paloh	: 1 Orang
24	UPP Kendawang	: 1 Orang
25	Badan SAR Nasional Kalbar	: 1 Orang
26	PT PELINDO Kalbar	: 1 Orang
27	PT Angkaa Pura II	: 1 Orang
28	PT Airnav Kalbar	: 1 Orang
29	BMKG Pontianak	: 1 Orang
30	Disrik Navigasi Pontianak	: 1 Orang
31	Kepala Bandara Pangsuma	: 1 Orang
32	Kepala Bandara Susilo	: 1 Orang
33	Kepala Bandara Rahadi oesman	: 1 Orang
34	Kepala Bandara Nanga Pinoh	: 1 Orang
35	Perum Damri Pontianak	: 1 Orang
36	Organda Provinsi kalbar	: 1 Orang
37	PT.ASDP Pontianak	: 1 Orang
38	Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wil XIV Kalbar	: 1 Orang
	Jumlah Peserta	: <u>104 Orang</u>

VIII. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Rakornis 2018 Bersumber dari DPA Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018.

Panitia Penyelenggara Menanggung :

- a. Fasilitas Ruangv Sidang
- b. Perlengkapan Untuk Peserta ,Materi Prsetasi dan alat Tulis
- c. Konsumsi Selama Rakornis

Untuk Biaya Trasnsportasi dan akomodasi peserta dari daerah asal menuju Putussibau PP ditanggung oleh masing masing peserta .

**PANITIA RAKORNIS PERHUBUNGAN
DIKABUPATEN KAPUAS HULU 16 APRIL 2018**

**PANITIA RAKORNIS PERHUBUNGAN
DIKABUPATEN KAPUAS HULU 16 APRIL 2018**

Tupoksi Bidang Teknik dan Sarana

BIDANG TEKNIK DAN SARANA

Bidang Teknik dan Sarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pengujian kendaraan bermotor, perawatan dan pemeliharaan kendaraan operasional, perencanaan, pengawasan dan pengelolaan perambuan dan fasilitas jalan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Teknik, Sarana dan Pengembangan Transportasi mempunyai fungsi :

- memverifikasi rencana dan program kerja di bidang teknik dan pengujian kendaraan bermotor, fasilitas jalan serta pengembangan sistem dan teknologi transportasi;
- merumuskan kebijakan teknis pengujian kendaraan bermotor, fasilitas jalan serta pengembangan sistem dan teknologi transportasi;
- mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
- menetapkan, pengadaan, pemasangan serta pemeliharaan fasilitas Jalan;
- memverifikasi rencana induk LLAJ kabupaten
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Dalam tugasnya Bidang Teknik, Sarana Dan Pengembangan Transportasi, membawahi:

- Seksi Teknik dan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Seksi Perlengkapan Jalan;
- Seksi Pengembangan Sistem dan Teknologi Transportasi.

1. SEKSI TEKNIK DAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Seksi Teknik dan Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas menyusun rencana, program kerja, perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan melaksanakan koordinasi pengujian kendaraan bermotor, penetapan daya angkut serta pembinaan bengkel umum dan karoseri kendaraan bermotor.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Teknik dan Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi:

- menyusun pengumpulan data, menyusun rencana dan program kerja di bidang pengujian kendaraan bermotor;
- menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengujian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten;
- melaksanakan koordinasi pengujian berkala kendaraan bermotor;
- memberikan petunjuk – petunjuk teknis tentang ketentuan persyaratan kendaraan wajib uji dan penetapan daya angkut kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan teknis kepada perusahaan karoseri dan perbengkelan kendaraan bermotor;

- melaksanakan pemeriksaan dan penilaian terhadap kendaraan dinas milik pemerintah yang akan dihapuskan dari inventaris;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

2. SEKSI PERLENGKAPAN JALAN

Seksi Perlengkapan Jalan mempunyai tugas menyusun rencana, program kerja, kebijakan teknis, penetapan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan di wilayah Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Perlengkapan Jalan mempunyai fungsi:

- menyusun pengumpulan data, menyusun rencana dan program kerja di bidang perlengkapan jalan;
- menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perlengkapan jalan di wilayah Kabupaten;
- menyusun dan menentukan rencana lokasi serta pengadaan dan pemasangan kebutuhan perlengkapan lalu lintas (rambu jalan, marka jalan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian pengaman pemakai jalan) serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
- melaksanakan perawatan perlengkapan jalan;
- menyusun penghimpunan data, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam wilayah Kabupaten;
- melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

3. SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM DAN TEKNOLOGI TRANSPORTASI

Seksi Pengembangan Sistem dan Teknologi Transportasi mempunyai tugas menyusun rencana, program kerja, kebijakan teknis, penataan dan pengembangan sistem dan teknologi transportasi darat, laut serta udara di wilayah Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Seksi Pengembangan Sistem dan Teknologi Transportasi mempunyai fungsi:

- menyusun pengumpulan data, menyusun rencana dan program kerja di bidang pengembangan sistem dan teknologi transportasi;
- menyusun bahan perumusan Kebijakan Teknis Pengembangan Sistem dan Tehknologi Transportasi di wilayah kabupaten;
- menyusun bahan rencana induk LLAJ Kabupaten;

- menyusun bahan rencana penataan sistem transportasi wilayah;
- menyusun bahan rencana pengembangan sarana dan prasarana transportasi;
- menyusun bahan rencana pengembangan transportasi berkelanjutan;
- menyusun bahan pengembangan studi dan penelitian masalah-masalah transportasi;
- menyusun bahan kegiatan pengembangan dan penerapan sistem informasi dan teknologi di bidang transportasi;
- merencanakan pembinaan dan pengawasan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan serta pemakaian jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai ijin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan atau pemerintah daerah;
- melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya

Tupoksi Bidang Manajemen Lalu Lintas

BIDANG MANAJEMEN LALU LINTAS

Bidang Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas menyusun rencana, program kerja, kebijakan teknis dibidang pengendalian, pengawasan dan melakukan manajemen dan pengawasan perparkiran untuk umum, serta melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Manajemen Lalu Lintas mempunyai fungsi:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Manajemen Lalu Lintas mempunyai fungsi:

- mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengendalian dan pengawasan, manajemen dan rekayasa serta perparkiran untuk umum;
- merumuskan kebijakan teknis dibidang pengendalian, pengawasan, perparkiran, manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- melaksanakan pengendalian dan pengawasan lalu lintas;
- melaksanakan pengendalian dan pengawasan manajemen parkir untuk umum;
- memverifikasi dokumen analisis dampak lalu lintas;
- menetapkan jaringan jalan kabupaten;
- menginventarisasi daerah rawan kecelakaan; dan
- melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Manajemen Lalu Lintas, membawahi:

- Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas;
- Seksi Perparkiran;
- Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN LALU LINTAS

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas mempunyai tugas Penyusunan rencana dan program kerja, melaksanakan pengawasan pengendalian dan pengaturan lalu lintas serta melakukan inventarisasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas mempunyai fungsi:

- menyusun pengumpulan data, penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengendalian dan pengawasan lalu lintas;
- menyusun bahan Perumusan Kebijakan Teknis Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas di wilayah Kabupaten;
- merencanakan penegakkan hukum dibidang lalu lintas dan angkutan orang dan barang;
- melaksanakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas darat serta melakukan koordinasi penyelenggaraan lalu lintas darat yang berada di wilayah Kabupaten;
- melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap kelebihan muatan;
- melaksanakan pengawasan, inventarisasi dan pendataan daerah rawan kecelakaan;
- menyelenggarakan pemberian izin dispensasi kelas jalan untuk angkutan barang pada jalan kabupaten;
- melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

SEKSI PERPARKIRAN

Seksi Perparkiran mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program kerja, manajemen dan pengawasan, menetapkan lokasi serta pemberian rekomendasi fasilitas parkir untuk umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perparkiran mempunyai fungsi:

- mengumpulkan data, menyusun rencana dan program kerja di bidang perparkiran;
- merumuskan Kebijakan Teknis perparkiran di wilayah Kabupaten;
- melaksanakan perencanaan dan penetapan lokasi parkir untuk umum;
- melaksanakan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;

- memberikan rekomendasi ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
- menghimpun dan menganalisa data guna pengelolaan dan manajemen parkir untuk umum;
- mengadakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perparkiran baik yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten maupun pihak ketiga;
- melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta menetapkan jaringan transportasi jalan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi:

- menyusun pengumpulan data, penyusunan rencana dan program kerja di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- menyusun bahan perumusan kebijakan teknis manajemen dan rekayasa wilayah Kabupaten;
- melaksanakan manajemen lalu lintas jalan Kabupaten;
- menyusun bahan dan data dalam rangka rekayasa lalu lintas;
- melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk jaringan jalan Kabupaten;
- memberikan persetujuan untuk hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALIN);
- menyusun dan menetapkan rencana kelas jalan di jalan Kabupaten;
- menyusun dan menetapkan rencana jaringan transportasi jalan tingkat kabupaten;
- melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018

Dalam penyelenggaraan tugas, bidang perhubungan sungai,danau dan penyebrangan mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan perhubunganbidang perhubungan sungai, danau dan penyeberangan
- Penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas
- Menghimpun, menyusun dan mengoordinasikan program kerja dan laporan bidang perhubungan sungai, danau dan penyeberangan
- Melaksanakan pembimbingan, pengawasan dan evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada seksi-seksi di bidang perhubungan sungai, danau dan penyeberangan
- Mendistribusikan dan mengoordinasikan tugas-tugas dari kepala dinas kepada para kepala seksi di bidang perhubungan sungai, danau dan penyeberangan
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas
- Penyiapan perencanaan kebutuhan pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas sungai sesuai dengan kewenangannya.
- Penyiapan bimbingan dan penyuluhan mengenai keselamatan berlalu lintas dan angkutan di sungai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Penyiapan penyelenggaraan, pengawasan dan perizinan pengangkutan orang dan barang di sungai, danau dan penyeberangan sesuai dengan kewenangannya
- Penetapan tarif angkutan orang dan barang dengan kendaraan umum di sungai, danau dan penyeberangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sungai Danau dan Penyeberangan Mempunyai Tugas:

- Membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana angkutan Sungai Danau dan penyeberangan.
-

Fungsi Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan:

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan di bidang sarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
- Penyusunan program kegiatan sarana prasarana sungai, danau, dan penyeberangan, sertifikasi, registrasi, dan penghapusan sarana angkutan sungai dan danau teknologi informasi dan komunikasi di bidang sarana angkutan, sungai, danau dan penyeberangan

- Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan teknologi dan rekayasa sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, teknologi informasi dan komunikasi di bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan jaringan prasarana dan simpul pelabuhan sungai danau dan penyeberangan
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan teknologi dan rekayasa serta pengembangan jaringan dan simpul prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pelabuhan sungai dan danau dan penyeberangan
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan teknologi dan rekayasa serta pengembangan jaringan dan simpul prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pelabuhan sungai dan danau dan penyeberangan
- Penyusunan langkah kegiatan sarana prasarana sungai, danau dan penyeberangan
- Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu sungai
- Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan

Tugas Bidang Sarana dan Prasarana Sungai Danau dan Penyeberangan:

- Menyusun perumusan kebijakan di bidang pengembangan teknologi dan rekayasa sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- Menyusun pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan teknologi dan rekayasa sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan teknologi dan rekayasa sarana angkutan, sungai, danau, dan penyeberangan.
- Menyusun rumusan kebijakan di bidang pengembangan jaringan prasarana dan simpul pelabuhan sungai dan danau dan penyeberangan kompetensi sumber daya manusia bidang prasarana
- Menyusun rumusan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan jaringan prasarana dan simpul pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.
- Menyusun rumusan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan jaringan prasarana dan simpul pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.
- Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan jaringan dan simpul prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan pelabuhan sungai dan danau dan penyeberangan dan kompetensi sumber daya manusia bidang prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi serta harmonisasi dan standarisasi regulasi prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan tingkat daerah serta konektivitas dan keterpaduan infra dan antar moda transportasi
- Menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan jaringan prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, simpul angkutan sungai, danau dan penyeberangan
- Menyiapkan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP) mempunyai peran yang sangat besar dalam menghubungkan daerah-daerah terpencil di Indonesia. Karena perkembangan keadaan, peran angkutan sungai, danau dan penyeberangan menjadi penyambung moda (multimoda), sehingga membutuhkan perhatian agar perannya menjadi lebih baik lagi.

“Sebab jika peran angkutan sungai danau dan penyeberangan terabaikan, akan membuat kendala pada jenis moda lain di berbagai wilayah, dan akhirnya suatu daerah terkendala perkembangannya” peranan layanan angkutan SDP sangat penting, terkait dengan karakteristik geografi Indonesia sebagai negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, tentu saja membuat penduduknya, sumber daya alam dan kekuatan ekonomi tersebar di sejumlah wilayah (pulau-pulau), sehingga membutuhkan sarana penghubung, dan salah satunya berupa angkutan sungai danau dan penyeberangan.

“Angkutan penyeberangan berperan sebagai jembatan yang menyambungkan sistem jaringan jalan raya ataupun jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan. Kini angkutan barang yang menggunakan sistem multi moda membutuhkan juga peran SDP,” kata Bobby R. Mamahit.

Hanya saja, tambah Capt. Bobby sumber daya manusia yang mempunyai keahlian SDP sampai saat ini masih terbatas. Untuk itu pemerintah terus mengembangkan tumbuh dan berkembangnya sumber daya manusia yang berkahlian SDP, melalui pengembangan program pendidikan.

“Terbukti saat ini dengan diwisudanya taruna-taruni Program Studi Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (LLASDP) Angkatan ke XX di BPPTD Palembang, yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dari STTD Bekasi,” katanya.

Hadir pada wisuda itu Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat Anton S. Tampubolon, sejumlah pejabat dari BPSDMP dan pemerintah daerah di Palembang, serta orang tua para wisudawan.

Kepala Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD), Bekasi, Christiono menyatakan untuk mengimbangi kebutuhan sumber daya manusia SDP program-program pendidikan akan di selenggarakan di sejumlah daerah. Tujuannya agar kuantitas dan kualitas SDM LLASDP meningkat pertumbuhannya.

“Beberapa BPPTD selama ini menyelenggarakan program yang diselenggarakan STTD akan ditingkatkan agar serapan taruna-taruni dan lulusannya meningkat,” ungkap Christiono se usai acara wisuda tersebut.

Tingginya kebutuhan ahli SDP dinyatakan oleh Christiono dengan diserapnya para lulusan program pendidikan dan pelatihan jurusan LLASDP selama ini.

“Lulusan program LLASDP terserap oleh pihak pemerintah daerah maupun operator angkutan,” ungkap Christiono yang juga lulusan STTD.

Dalam laporan kegiatan wisuda itu, Ketua Program Studi (Prodi) D III LLASDP, di BPPTD Chaidirrozi, menyatakan setelah melalui pendidikan dan ujian selama tiga tahun, maka 52 orang taruna angkatan XX dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Ahli Madya Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Program Studi D III LLASDP yang ada di BPPTD Palembang merupakan bagian dari program studi yang ada di Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD), Setu, Bekasi. Program studi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan tenaga ahli dan terampil, di bidang manajemen dan teknik rekayasa lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan.

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Palembang, Wawan Darwan menyatakan disamping menyelenggarakan diklat pembentukan, BPPTD Palembang juga menyelenggarakan diklat pendek (short course) di bidang LLASDP antara lain Diklat Orientasi LLASDP, Sertifikat dan Registrasi Kapal ASD, Manajemen Operasional Angkutan SDP, Manajemen Operasional Pelabuhan Penyeberangan, Teknik Operasional LLASDP, dan Petugas Keselamatan Pelayaran SDP, serta membuka kesempatan kerjasama untuk penyelenggaraan tailor made course.

“Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat BPPTD Palembang juga melaksanakan penyuluhan keselamatan pelayaran kepada operator kapal SDP di berbagai wilayah

**PENJELASAN POS-POS NERACA
PER 31 DESEMBER 2016**

	<u>T A H U N 2 0 1 6</u>		<u>T A H U N 2 0 1 5</u>	
ASET	Rp.	29.561.525.367,97	Rp.	30.148.116.867,98
1. ASET LANCAR	Rp.	0,00	Rp.	0,00
Terdiri dari :				
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	0,00	Rp.	0,00
Kas	Rp.	0,00	Rp.	0,00
Jumlah tersebut merupakan saldo kas yang ada per 31 Desember 2016 dan 2009.				
ASET TETAP	Rp.	29.561.525.367,97	Rp.	30.148.116.867,98
Jumlah tersebut merupakan nilai buku asset tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 yang terdiri dari:				
Tanah	Rp		Rp	
169.450.000,00				
		Rp		
		78.500.		
000,00				
Peralatan dan Mesin :				
Alat-alat Berat	Rp	17.500.000	Rp	17.500.000
Alat-Alat Angkutan	Rp	8.785.454.666,13	Rp	8.785.454.666,13
Alat Bengkel	Rp	17.620.300,00	Rp	17.620.300,00
Alat Pertanian dan peternakan	Rp	0,00	Rp	0,00
Alat Kantor & Rumah Tangga	Rp	2.255.748.475,61	Rp	1.909.664.475,61
Alat Studio dan Alat Komunikasi	Rp	924.264.845,77	Rp	924.264.845,77
Alat Laboratorium	Rp	703.903.700,00	Rp	703.903.700,00
Gedung dan Bangunan :				
Bangunan Gedung	Rp	12.107.798.657,35	Rp	12.857.601.157,35
Bangunan Gedung-Monumen dan Tugu	Rp	1.084.753.642,00	Rp	1.084.753.642,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan :				
Jalan dan Jembatan	Rp	0,00	Rp	0,00
Bangunan Air (irigasi)	Rp	2.410.467.081,12	Rp	2.448.967.081,12
Instalasi dan Jaringan	Rp	74.866.000,00	Rp	310.189.000,00
Aset Tetap Lainnya :				
Buku Perpustakaan				
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	1.009.698.000,00	Rp	1.009.698.000,00
2. ASET LAINNYA	Rp.	0,00	Rp.	00,0
Aset Lain-lain	Rp	0,00	Rp	0,00
EKUITAS	Rp.	29.561.525.367,97	Rp.	30.148.116.867,98
JUMLAH EKUITAS DANA	Rp.	29.561.525.367,97	Rp.	30.148.116.867,98
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	Rp.	29.561.525.367,97	Rp.	30.148.116.867,98

PROFIL PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

<p>Drs. H. ABDUL HALIM NIP 19600410 198910 1 002</p>		
	Nama	: Drs.H.ABDUL HALIM
	NIP	: 19600410 198910 1 002
	Pangkat Golongan	: Pembina TK.1
	Jabatan	: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

<p>Dra. GEMITI NIP. 19640915 199303 2 004</p>		
	Nama	: Dra.GEMITI
	NIP	: 19640915 199303 2 004
	Pangkat Golongan	: Pembina TK.I
	Jabatan	: SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

PROFIL PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

<p>FATMAWATI NIP 19640422 198603 2 009</p>		
	Nama	: FATMAWATI
	NIP	: 19640422 198603 2 009
	Pangkat Golongan	: Penata III /c
	Jabatan	: KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

<p>KHAJIJAH NIP 19690608 199203 2 012</p>		
	Nama	: KHAJIJAH
	NIP	: 19690608 199203 2 012
	Pangkat Golongan	: Penata III /c
	:	KASUBBAG UMUM DAN APARATUR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

PROFIL PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

<p>IRWAN.S.Sos NIP 19690421 199703 1 006</p>		
	Nama	: IRWAN.S.Sos
	NIP	: 19690421 199703 1 006
	Pangkat Golongan	: Pembina IV / a
	Jabatan	: STAF BIDANG PROGRAM DAN KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

<p>KADARUSMAN, SE NIP 19750107 200701 1 010</p>		
	Nama	: KADARUSMAN .SE
	NIP	: 19750107 200701 1 010
	Pangkat Golongan	: Penata Muda III / a
		:

PROFIL PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

<p align="center">SRI KURNIATI NIP 19730119 200701 2 012</p>		
	Nama	: SRI KURNIATI
	NIP	: 19730119 200701 2 012
	Pangkat Golongan	: Pengatur II /c
	Jabatan	: STAF BIDANG UMUM DA APARATUR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

<p align="center">SURAJI NIP 19760502 201212 1 002</p>		
	Nama	: SURAJI
	NIP	: 19760502 201212 1 002
	Pangkat Golongan	: Penata Muda II/a
	Jabatan	: STAF BIDANG UMUM DA APARATUR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

PROFIL PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU
 BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

<p>H. ILHAMSYAH UGEN, M.H NIP 19690329 200701 1 023</p>		
	Nama	: H. ILHAMSYAH UGEN, SH. MM
	NIP	: 19600329 200701 1 023
	Pangkat Golongan	: Penata TK.I / III.d
	Jabatan	: KEPALA BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

<p>BUJANG P NIP 19660314 198603 1 015</p>		
	Nama	: BUJANG P
	NIP	: 19660314 198603 1 015
	Pangkat Golongan	: Penata TK.I / III.d
	Jabatan	: KEPALA SEKSI KESELAMATAN SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

<p>SUFIANDI NIP 19610927 198302 1 005</p>		
	Nama	: SUFIANDI
	NIP	: 19610927 198302 1 005
	Pangkat Golongan	: Penata Muda TK.I / III.b
	Jabatan	: Plt. KEPALA SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

<p>YOSEP KASIMO NIP 19600731 198402 1 001</p>		
	Nama	: YOSEPH KASIMO
	NIP	: 19600731 198402 1 001
	Pangkat Golongan	: Penata TK.I / III.d
	Jabatan	: KEPALA TERMINAL BADAU

<p>TITUS B NIP 19640702 198903 1 017</p>		
	Nama	: TITUS BAET
	NIP	: 19640702 198903 1 017
	Pangkat Golongan	: Penata Muda TK.I / III.b
	Jabatan	: STAF SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

<p>KANISIUS GILING PUTRA NIP 19640909 198703 1 016</p>		
	Nama	: KANISIUS GILING PUTRA
	NIP	: 19640909 198703 1 016
	Pangkat Golongan	: Penata Muda TK.I / III.b
	Jabatan	: KEPALA POS SIMPANG SILAT

<p>SUBOWO NIP 19630710 198903 1 024</p>		
	Nama	: SUBOWO
	NIP	: 19630710 198903 1 024
	Pangkat Golongan	: Penata / III.c
	Jabatan	: STAF SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

<p>IBRAHIMSYAH NIP 19690204 199303 1 005</p>		
	Nama	: IBRAHIMSYAH
	NIP	: 19690204 199303 1 005
	Pangkat Golongan	: Penata Muda TK.I / III.b
	Jabatan	: STAF SEKSI KESELAMATAN SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

<p>FITRI ADAT TIMUR, SE NIP 19810801 200801 2 020</p>		
	Nama	: FITRI ADAT TIMUR, SE
	NIP	: 19810801 200801 2 020
	Pangkat Golongan	: Penata Muda TK.I / III.b
	Jabatan	: STAF SEKSI KESELAMATAN SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

<p>SYAHRIALSALAUDDIN NIP 19800419 201212 1 001</p>	Nama	: SYAHRIAL SALAUDDIN
	NIP	: 19800419 201212 1 001
	Pangkat Golongan	: Pengatur Muda / II.a
	Jabatan	: STAF SEKSI KESELAMATAN SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

KEGIATAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (KIR) KELILING DI KECAMATAN BADAU

STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN KIR :

PAGI : 08 .00 WIB – 11.30 WIB

SIANG : 13.00 WIB - 15 .00 WIB

Bertempat di Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Jalan Nusa Indah No.05

PENERTIBAN PARKIR DIPASAR MERDEKA

MONITORING RAMBU – RAMBU LALU LINTAS

JALAN ISKANDAR MUDA

(Belum terpasang rambu-rambu persimpangan tiga ganda kanan dan kiri)

JALAN AON

(Belum terpasang rambu-rambu tikungan tajam kanan kiri)

JALAN A. PANGKAR

(Belum terpasang rambu-rambu simpang empat)

JALAN M. YASIN

(Belum terpasang rambu-rambu simpang tiga tipe (T))

JALAN KS. TUBUN

(Terdapat rambu-rambu yang tumbang dan rusak)

Jln.Ks.Tubun Belum Terpasang Rambu-Rambu Lalu Lintas Tikungan Kiri Kanan

JALAN KS. TUBUN

(Belum terpasang rambu-rambu penyempitan jalan)

KEGIATAN RAMP CHECK DI TERMINAL KEDAMIN

RAZIA GABUNGAN BERSAMA POLANTAS POLRES KAPUAS HULU

RAZIA GABUNGAN BERSAMA POLANTAS POLRES KAPUAS HULU

TERMINAL PUTUSSIBAU KOTA

Terminal Putussibau Kota berada Kecamatan Putussibau Utara, Terminal ini bertipe C. Kepala Terminal Putussibau Kota adalah Bapak SUFIANDI dan dibantu oleh 1 (satu) orang staf ADI.

Gambaran Terminal Putussibau Kota disaat Musim Hujan

TERMINAL PUTUSSIBAU KOTA

TERMINAL BADAU

Terminal Badau berada Kecamatan Badau yang berbatasan langsung dengan Negara Tetangga yaitu Malaysia, Terminal ini bertipe C. Kepala Terminal Badau adalah Bapak YOSEPH KASIMO dan dibantu oleh 1 (satu) orang staf SARMILI

TERMINAL SEMITAU

Terminal Semitau berada Kecamatan Semitau, Terminal ini bertipe C

	Nama PT	Dermaga/Pelabuhan yang di usulkan
	Paramita Internusa Pratama	a. Dermaga Seberuang b. Dermaga Jentu 2
	Duta Nusa Lestari	a. Dermaga Kenepai b. Dermaga Marsedan Raya 3
	Anugerah Makmur Sejati	a. Dermaga Jentu 1
	Kartika Prima Cipta	a. Dermaga Marsedan Raya 1

DERMAGA PENGANGKUT BARANG
DATA DERMAGA PENYEBERANGAN MILIK SWASTA

	Nama PT	Dermaga/Pelabuhan yang di usulkan
	Persada Graha Mandiri	a. Dermaga Perigi
	Kartika Prima Cipta	a. Dermaga Marsedan Raya 2
	Paramita Internusa Pratama	a. Dermaga Bibitan
	Duta Nusa Lestari	a. Dermaga Sungai Asun

MONITORING KE DERMAGA JONGKONG